

# **PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI MODEL WISATA EDUKASI (STUDI KASUS DI BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR)**

**Diah Zuhriana<sup>1</sup>, Caca Syahroni<sup>2</sup>, Adi Susmianto<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, diahz31@yahoo.com

<sup>2</sup>Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional,  
c.syahroni@gmail.com

<sup>3</sup>Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan,  
adi.susmianto@gmail.com

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengembangan kompetensi pengelola yang sesuai dengan rumusan model wisata edukasi di BPLHK Bogor. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 86% responden sangat mendukung pemanfaatan Hutan Diklat Rumpin sebagai lokasi wisata edukasi. Pengunjung dan pengelola menyatakan bahwa Hutan Diklat Rumpin sesuai untuk dijadikan wisata edukasi karena adanya objek/atraksi wisata dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, sebanyak 14% responden berpersepsi kurang positif terkait pemanfaatan Hutan Diklat Rumpin sebagai lokasi wisata edukasi, dengan alasan kurang memadai dalam hal sarana transportasi, fasilitas, sarana komunikasi, serta ketersediaan petunjuk/informasi/media. Dari hasil analisis *supply demand*, model wisata edukasi yang dikembangkan adalah terkait konten dan kemasan wisata edukasi, promosi dan pemasaran, serta pelayanan wisata edukasi. Pengembangan materi konten wisata edukasi meliputi atraksi outbond, minizoo dan taman bermain. Materi terkait promosi dan pemasaran wisata edukasi yaitu pengelolaan medsos facebook, Instagram, twitter, dengan memperhatikan aspek kontinuitas dalam membuat/memperkaya konten pada sosial media. Pengembangan materi pelayanan terkait fisik, keandalan, empati, jaminan dan kepastian serta pelayanan kerjasama pengelolaan. Metode pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pengelola yaitu secara klasikal dan non klasikal, dengan pendekatan; pelatihan, sosialisasi, magang, dan studi banding.

**Kata Kunci** : Pengembangan Kompetensi, Model, Wisata Edukasi

## **ABSTRACT**

*This research aims to formulate the development of management competencies that align with the educational tourism model at BPLHK Bogor. The approach in this study is qualitative with a descriptive method through case studies. The results indicate that 86% of respondents strongly support the utilization of the Rumpin Training Forest as an educational tourism location. Visitors and managers state that the Rumpin Training Forest is suitable for educational tourism due to the presence of tourist objects/attractions and adequate facilities. Meanwhile, 14% have a less positive perception, as BPLHK Bogor is deemed insufficient in terms of transportation facilities, amenities, communication means, and the availability of signs/information/media. From the supply-demand analysis, the*

*developed educational tourism model is related to the content and packaging of educational tourism, promotion and marketing, as well as educational tourism services. The development of educational tourism content materials includes outbound attractions, minizoo and playgrounds. Materials related to the promotion and marketing of educational tourism are the management of social media Facebook, Instagram, twitter, by paying attention to the aspect of continuity in creating/enriching content on social media. Development of service materials related to physicality, reliability, empathy, assurance and certainty as well as management cooperation services. The competency development methods needed by managers are classical and non-classical, with the approach; training, socialization, internships, and comparative studies.*

**Keyword:** *Competency Development, Model, Educational Tourism*

## PENDAHULUAN

Kecamatan Rumpin merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bogor yang memiliki permasalahan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD, 2014), salah satu dari empat kecamatan yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana tanah longsor yaitu Rumpin, dikarenakan memiliki potensi bencana longsor menengah hingga tinggi dan pertumbuhan penduduk yang meningkat cenderung di wilayah sekitaran perbukitan. Banyaknya galian tambang baik legal maupun illegal di wilayah Rumpin membawa dampak lingkungan dan kesehatan yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakatnya. Ada 14 perusahaan tambang di kecamatan Rumpin yang resmi terdaftar di Dinas ESDM Jawa Barat, dan diperkirakan 1000 armada truk fuso colt diesel yang setiap hari melakukan transaksi di lokasi tambang pasir. Para penambang ini sering menggunakan teknik-teknik yang merusak lingkungan, seperti penggunaan bahan kimia berbahaya atau merusak lahan secara tidak terkendali (Cadizza Riza dan Chatias Riza Pratama, 2024). Hasil penelitian Agustini dan Marpaung (2023), menyatakan bahwa dampak negatif yang dihasilkan termasuk kedalam permasalahan yang cukup serius dimana pernah terjadi longsor pada tahun 2019, rusaknya infrastruktur berupa jalan yang cukup parah, meningkatnya jumlah pencemaran dan polusi udara yang ada yang berasal dari debu penggalian dan juga kendaraan besar yang lalu alang di

wilayah tersebut, serta gangguan pernafasan dan infeksi saluran pernafasan (ISPA). Pada tahun 2018, warga Kecamatan Rumpin yang terjangkit ISPA sebanyak 2.900 orang atau 5,9 persen, tahun sebelumnya 3.767 orang atau 7,69 persen, data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menyebut pengidap ISPA di Rumpin pada 2017 mencapai 3.767 orang (setara kira-kira 10 orang per hari) (Bogor kita.com, 2019; Rio, 2017).

Krisis lingkungan yang dihadapi di Kecamatan Rumpin akibat dari pengelolaan lingkungan yang kurang tepat. Untuk mencegah meningkatnya kerusakan lingkungan, maka diperlukan sarana informasi dan pembelajaran mengenai lingkungan hidup bagi masyarakat. Harapannya adalah masyarakat memahami dan timbul kesadaran untuk berperan aktif dalam memelihara kelestarian lingkungannya. Penataan dan pengelolaan lingkungan hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan kini dan yang akan datang. Adalah kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan agar dapat tetap dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya (Rusdiyanto, 2015).

Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki rasa cinta lingkungan adalah melalui wisata edukasi. Selain untuk meningkatkan kesadaran ekologis, wisata edukasi juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Undang-undang No 10 tahun 2009 menyebutkan bahwa dengan adanya obyek wisata disuatu daerah akan sangat menguntungkan, diantaranya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menanamkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan alam dan budaya setempat.

Pengembangan wisata di wilayah kecamatan Rumpin sangat dimungkinkan, dengan adanya potensi-potensi yang tersedia. Hal ini juga tercantum dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bogor Tahun 2015-2019, bahwa salah satu prioritas yang akan dikembangkan di wilayah Kecamatan Rumpin adalah sektor pariwisata. Dengan potensi dan permasalahan yang ada terutama kerusakan lingkungan, maka wisata edukasi merupakan jenis wisata yang sangat sesuai untuk dikembangkan di wilayah Kecamatan Rumpin. Wisata edukasi berintikan edukasi tentang lingkungan hidup yang merupakan sebuah proses untuk membangun masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama, baik secara individu maupun kolektif, untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini, dan mencegah timbulnya masalah baru (UNESCO, 1977). Wood (2002) menyatakan bahwa ekowisata akan dapat memelihara daerah alami, mendidik pengunjung tentang kelestarian alam dan memberikan keuntungan sosial ekonomi kepada penduduk lokal, dan bentuk wisata edukasi menurut Georgia Yfantidou dan Dimitrios Goulimaris (2018), merupakan kegiatan wisata bagi mereka yang melakukan perjalanan liburan dan tamasya, yang pendidikan dan pembelajarannya menjadi bagian utama atau menengah.

Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Bogor yang berada di wilayah Kecamatan Rumpin memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan, kerjasama

dalam pelatihan, serta pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk pendidikan dan pelatihan (Keputusan Menteri LHK, 2021). Kawasan Hutan dengan Tujuan khusus (KHDTK) pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Hutan Diklat Rumpin merupakan sarana diklat yang dikembangkan sebagai lokasi praktik diklat. Balai Pelatihan LHK Bogor, secara implisit juga dapat melakukan pembinaan bidang LHK di wilayahnya, oleh karena itu pengembangan wisata edukasi akan dimulai dikembangkan dari BPLHK Bogor. Potensi yang dimiliki oleh BPLHK Bogor adalah hutan diklat seluas 75,353 hektar beserta flora fauna dan fasilitasnya yang dapat menjadi laboratorium pengembangan wisata edukasi di Kecamatan Rumpin. Sedapat mungkin pengembangan ini dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi BPLHK Bogor.

Salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan pengembangan wisata edukasi di BPLHK Bogor adalah kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola wisata edukasi tersebut. Hasil penelitian Maesari, N., dkk, (2019) menyatakan bahwa indikator untuk menjadi destinasi wisata edukasi yang ideal mencakup atraksi yang ingin ditampilkan, sumber daya manusia atau staf, fasilitas, dan perencanaan pariwisatanya. Pengelolaan wisata edukasi mengandung banyak kegiatan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang spesifik yang harus dipenuhi, karena terkait dengan aspek pelayanan kepada orang-orang yang akan mengunjungi wisata edukasi tersebut. Bahkan Prahalad & Hamel (1990) menyatakan bahwa kegiatan dalam pariwisata harus memiliki keterampilan khusus yang tidak mudah ditiru oleh pesaing, sehingga dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

## **KAJIAN LITERATUR**

Beberapa penelitian terdahulu sudah cukup beragam membahas

mengenai pengembangan wisata edukasi. Meskipun demikian, belum banyak ditemukan penelitian mengenai pengembangan wisata edukasi yang didasarkan pada model wisata edukasi spesifik daerah dengan pendekatan metode analisis *supply dan demand* serta bagaimana peningkatan kompetensi pengelolanya. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengembangan kompetensi bagi pengelola wisata edukasi yang akan dikembangkan di BPLHK Bogor. Sebagai sebuah perencanaan awal, pengembangan kompetensi menjadi sangat penting agar implementasi kegiatan wisata edukasi di Hutan Diklat Rumpin dapat mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Pendekatan yang digunakan dalam menemukan aspek-aspek yang penting untuk pengembangan kompetensi dalam mengelola wisata edukasi di BPLHK Bogor ini yaitu melalui pendekatan penawaran potensi wisata (*supply*) dan permintaan masyarakat potensial (*demand*) di sekitar Kawasan Hutan Diklat Rumpin, yang didasarkan pada pendekatan *supply-demand* pariwisata yang diadopsi dari konsep Bodger (1998).

Dalam penelitian ini *supply* yang dimaksud adalah jumlah dan jenis terkait 5 (lima) komponen wisata edukasi yaitu partisipan atau pengelola objek wisata edukasi, objek/atraksi wisata edukasi, fasilitas dan sarana pendukung, aksesibilitas dan transportasi serta media informasi dan promosi yang tersedia di BPLHK Bogor, sedangkan *demand* adalah permintaan/kebutuhan responden terkait 5 (lima) komponen wisata edukasi tersebut. Gap antara komponen wisata edukasi yang tersedia dan yang diinginkan/dibutuhkan oleh responden menjadi aspek-aspek yang harus dikembangkan. Sebagai contoh, permintaan responden terkait partisipan/pengelola wisata edukasi agar melibatkan sekolah, mahasiswa dan perangkat desa, sedangkan saat ini pengelola wisata

edukasi hanya BPLHK Bogor dan masyarakat lokal.

Selanjutnya hasil identifikasi gap *supply demand* ini dianalisis untuk pengembangan wisata edukasi dengan membangun model wisata edukasi yang spesifik di BPLHK Bogor, baik pengembangan komponen wisatanya maupun pengembangan kompetensi bagi pengelolanya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui persepsi stakeholder terhadap keberadaan BPLHK Bogor. Metode kualitatif digunakan untuk lebih memahami dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi terhadap permintaan wisata edukasi dari stakeholder, dan penawaran potensi wisata edukasi yang diberikan oleh BPLHK Bogor, hingga terbentuknya sebuah model wisata edukasi yang sesuai untuk dikembangkan oleh BPLHK Bogor. Analisis *supply demand* digunakan untuk mengetahui perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) wisatawan terkait komponen wisata edukasi yaitu partisipan, daya tarik/atraksi wisata yang ada, pelayanan dan fasilitas, aksesibilitas termasuk transportasi dan informasi (Bodger, 1998). Pendekatan teori *supply-demand* Bodger (1998) dipilih karena lebih dinamis, realistis, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi modern. Dengan memasukkan faktor psikologi pasar, khususnya terkait pasar wisata alam dan kebijakannya yang sangat dinamis.

Menurut Gunn (1988) dan Mill and Morrison (1985), sistem wisata adalah hubungan antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Penduduk yang berkeinginan dan berkemampuan untuk mengadakan perjalanan, atau dengan kata lain wisatawan, sebagai permintaan, dan dari segi penawaran adalah berbagai jenis moda transportasi, atraksi wisata, fasilitas dan pelayanan jasa bagi wisata

dan juga penyediaan informasi dan promosi wisata. Teori *supply-demand* Gunn (1988) tidak hanya memandang pariwisata dari sisi *supply* (penyediaan wisata) dan *demand* (permintaan wisatawan) secara terpisah, tetapi juga melihat interaksi kompleks antara destinasi, wisatawan, infrastruktur, serta kebijakan pemerintah. Teori ini sangat relevan untuk pengembangan destinasi wisata berkelanjutan dan perencanaan jangka panjang.

Metode kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan bentuk pengembangan kompetensi yang dibutuhkan pengelola sesuai model wisata edukasi. Populasi mencakup stakeholder dan masyarakat di sekitar wilayah BPLHK Bogor, yang meliputi pegawai lingkup Kecamatan Rumpin, usaha wisata Pelita Desa, Desa yang berbatasan dengan KHDTK Hutan Diklat Rumpin yaitu Desa Rumpin dan Desa Kampung Sawah. Populasi juga meliputi masyarakat, para Guru dan siswa SMAN 1 Rumpin dan SMPN 1 Rumpin, siswa SMK, para Guru SD Negeri di Rumpin serta mahasiswa yang mengikuti praktek kerja lapangan di BPLHK Bogor.

Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* (Altinay dan Paraskevas 2008), yaitu responden yang mengetahui keberadaan dan pernah berkunjung ke BPLHLK Bogor. Pengelola wisata edukasi adalah pegawai lingkup BPLHK Bogor, yang terdiri dari pegawai di seksi sarana dan evaluasi pelatihan yang mengelola hutan diklat, Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan, pegawai di bagian tata usaha, kelompok fungsional widyaiswara dan kelompok fungsional penyuluh, yang diharapkan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengelola wisata edukasi di BPLHK Bogor.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau orang yang terlibat dalam penelitian yang membutuhkannya (Sugiyono, 2019).

Data primer *supply* wisata edukasi meliputi partisipan, daya tarik wisata edukasi, pelayanan dan fasilitas, aksesibilitas, serta informasi dilakukan dengan mencatat hasil observasi lapangan, melalui kuesioner serta wawancara dengan pengelola. Sedangkan *demand* masyarakat dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada responden yang telah ditentukan, disertai observasi langsung.

Data persepsi masyarakat terhadap pengembangan wisata edukasi di Hutan Diklat Rumpin dikaji untuk mengetahui potensi wisata edukasi. Data pengunjung diambil dengan memilih pengunjung yaitu pegawai Kecamatan Rumpin, pegawai Desa, mahasiswa, siswa/siswi SMP, SMA dan SMK, guru-guru PAUD, SD, SMP dan SMA yang pernah mengunjungi Hutan Diklat Rumpin. Pengambilan data primer juga dilakukan terhadap pegawai lingkup BPLHK Bogor, terkait pengembangan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan wisata edukasi. Jenis pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara no 11 tahun 2018 dan karakteristik kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola wisata edukasi. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan studi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Pengelola juga perlu memperhatikan kepentingan pengunjung secara tepat dengan cara memadukan kepentingan perlindungan potensi penawaran (*supply*) dengan tetap memperhatikan aspek permintaan (*demand*). Analisis perencanaan manajemen ini dikenal sebagai analisis *supply* dan *demand* (Gold 1980; Cooper et al. 1998). Oleh karena itu metode analisis yang digunakan meliputi analisis *supply-demand*, dan analisis deskriptif.

Analisis *supply-demand* bertujuan mengetahui karakteristik dan kondisi potensi wisata edukasi. Analisis *demand* untuk mengenali pola karakteristik wisata edukasi permintaan pengunjung, analisis *supply* untuk mengenali

ketersediaan komponen wisata edukasi di Hutan Diklat. Berdasarkan hasil analisis *supply demand* tersebut kemudian dibuat model wisata edukasi yang sesuai dengan karakteristik Hutan Diklat Rumpin. Priyandari (2011) mendefinisikan model sebagai tiruan sebuah sistem yang disusun untuk mempelajari karakteristik sistem nyatanya. Oleh karena tiruan, maka karakteristik sistem yang digambarkan dalam model biasanya tidak menyeluruh, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan tujuan studi, dalam hal ini adalah untuk mengembangkan wisata edukasi di BPLHK Bogor melalui model yang dibangun.

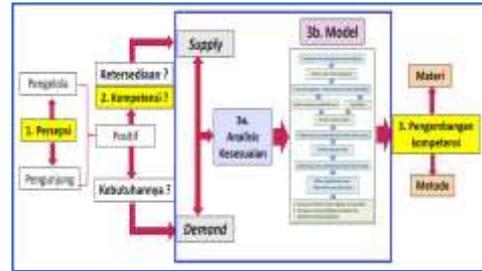
Model wisata edukasi di BPLHK Bogor yang dibangun merupakan sebuah sistem wisata yang terdiri dari 5 komponen yaitu konten/objek atraksi wisata edukasi, kemasan/paket-paket wisata edukasi, aksesibilitas dan transportasi, fasilitas dan sarana pendukung serta pelayanan.

Selanjutnya analisis deskriptif digunakan dalam menyusun kebutuhan pengembangan kompetensi dalam pengelolaan wisata edukasi. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan uraian.

**PEMBAHASAN**

Untuk mempermudah pemahaman, maka pembahasan akan sesuai dengan bagan alur berikut ini (Gambar 1). Dimulai dari menjelaskan hasil mengenai persepsi responden sebagai pengunjung dan persepsi pengelola wisata edukasi di BPLHK Bogor.

Setelah diketahuinya persepsi, berikutnya adalah menjelaskan hasil dari supply dan demand dan analisis kesesuaiannya sebagai dasar penyusunan model wisata edukasi. Setelah model wisata edukasi di BPLHK Bogor terbangun, maka selanjutnya dianalisis bagaimana mengembangkan kompetensi pengelola wisata edukasi yang sesuai dengan model tersebut.



Sumber : Data primer diolah (2024)  
Gambar 1.

Bagan alur pembahasan  
**Persepsi Pengelola dan Pengunjung**  
**a. Persepsi Pengelola**

Sebagian besar pengelola (41,4%) menyatakan bahwa Hutan Diklat Rumpin sesuai dan 31% menyatakan sangat sesuai untuk lokasi wisata edukasi. Hal ini karena potensi objek wisata edukasi berada dalam kategori cukup tinggi. Selain itu, menurut pengelola (51,7%), BPLHK Bogor cukup lengkap menyediakan fasilitas untuk wisata edukasi. Selain dalam lingkup BPLHK Bogor, 65,5% pengelola juga menyatakan bahwa lingkungan di Kecamatan Rumpin secara umum sesuai untuk menjadi lokasi wisata edukasi, dengan objek wisata yang cukup banyak (3-4) objek. Secara lengkap persepsi pengelola terhadap potensi Hutan Diklat BPLHK bogor sebagai wisata edukasi disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.

Persepsi pengelola terhadap potensi wisata edukasi

No	Persepsi	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Kesesuaian untuk lokasi wisata edukasi		✓		
2	Kesesuaian lingkungan di Kecamatan Rumpin untuk wisata edukasi	✓			
3	Potensi objek wisata		✓		
4	Kelengkapan Fasilitas		✓		
5	Frekuensi kunjungan masyarakat/pelajar/petah laun		✓		
6	Sarana transportasi				✓
7	Aksesibilitas			✓	
8	Sarana komunikasi			✓	
9	Fasilitas di sekitar BPLHK Bogor			✓	
10	Promosi informasi			✓	
11	Ketersediaan petunjuk/informasi/media				✓
12	Ketersediaan fasilitas di Kecamatan Rumpin			✓	
	JUMLAH	1	4	6	2

Sumber : Data primer diolah (2024)

Ada 2 aspek yang menurut persepsi pengelola kurang baik, yaitu sarana transportasi dan ketersediaan petunjuk/informasi/media. Sarana transportasi dan promosi/informasi merupakan aspek yang sangat penting bagi pengembangan wisata edukasi. Dengan jumlah terbesar pengunjung di rentang usia milenial (<17

sd 26 tahun), maka promosi/informasi melalui medsos merupakan salah satu kompetensi yang harus ditingkatkan bagi pengelola, sedangkan sarana transportasi bisa ditingkatkan melalui kolaborasi dengan banyak pihak. Menurut Ali Hasan (2009), promosi adalah suatu bentuk kegiatan komunikasi pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, mengingatkan pasar sasaran agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan pernyataan tersebut maka dapat dipastikan bahwa jika promosinya kurang optimal, akan berpengaruh pada besarnya jumlah pengunjung datang.

**b. Persepsi Pengunjung**

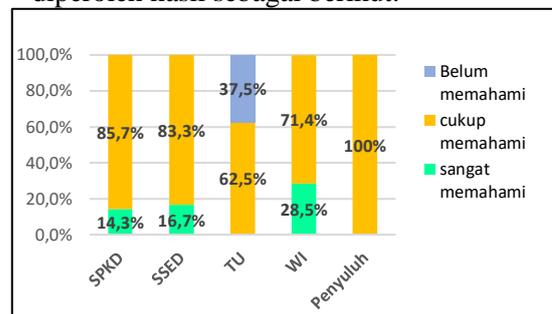
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh reponden mengetahui keberadaan dan pernah berkunjung ke BPLHK Bogor, dimana sebagian besar berasal dari informasi lisan (69%) dari keluarga, saudara, teman, sekolah dan relasi . Tujuan berkunjung sebagian besar untuk berolah raga dan khususnya pendidikan. Sebagian besar responden telah lebih dari 5 kali berkunjung (61%) dan kebanyakan pada hari libur (35%). Waktu berkunjung biasanya pada pagi dan 44 siang hari, sesuai dengan keperluan dan tujuan berkunjung, yaitu berolah raga atau jalan-jalan sore.

Persepsi responden mengenai kawasan hutan di BPLHK Bogor, sebagian besar menyatakan bahwa BPLHK Bogor cukup sejuk karena banyak pepohonan (44%), bagus dan memiliki potensi pepohonan (29%), cukup bagus pemandangannya (11%) dan nyaman untuk bermain (11%). Sebagian besar responden menyatakan bahwa kawasan KHDTK Hutan Diklat BPLHK Bogor sudah cocok untuk menjadi tempat wisata (86%). Hal ini karena 23% responden menyatakan udara sejuk, pemandangan bagus/indah (20%) dan nyaman (9%). Namun demikian ada 12% responden menyatakan bahwa BPLHK Bogor belum cocok karena adanya kekhawatiran akan merusak hutan yang ada, kurang unik dan sarana

dan prasarana nya kurang memadai. Responden sebagian besar menyatakan bahwa jenis wisata yang disukai adalah wisata pendidikan (40%), wisata hutan (30%) dan wisata permainan (24%). Menurut responden objek wisata yang harus dimiliki BPLHK Bogor, haruslah yang menarik dan beragam (35%), juga objek wisata yang banyak (20%). Objek wisata di Rumpin yang disukai oleh responden, terbanyak adalah persemaian tanaman dan tanaman obat (19%), arboretum (17%) dan penangkaran kupu-kupu (17%).

**Kompetensi Pengelola Wisata Edukasi Saat ini**

Sebagai pengelola wisata edukasi di Hutan Diklat Rumpin, tentunya dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Temuan hasil penelitian Maesari, N., dkk (2019) menyatakan bahwa indikator untuk menjadi destinasi wisata edukasi yang ideal mencakup atraksi yang ingin ditampilkan, sumber daya manusia atau staf, fasilitas, dan perencanaan pariwisatanya. Artinya bahwa keberadaan sumber daya manusia dan staf yang kompeten sangat menentukan keberhasilan pengelolaan wisata edukasi. Dalam hal tingkat pemahaman mengenai wisata edukasi, diperoleh hasil sebagai berikut:



Sumber : Data primer diolah (2024)

Gambar 2.

Tingkat pemahaman pengelola terkait wisata edukasi dapat dilihat bahwa sebagian besar pemahaman pengelola pada berbagai bidang tugas, masih dalam tingkatan cukup memahami, bahkan pada Subbagian TU, 37,5% pengelola belum memahami. Pada pengelola yang berasal dari bidang tugas Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat dan Seksi Sarana

dan Evaluasi Diklat, serta widyaiswara, hanya sebagian kecil saja yang sudah sangat memahami. Pengelola tersebut telah melakukan kegiatan kegiatan pendampingan pendidikan lingkungan sejak tahun 2018, pada siswa SMPN 1 Rumpin dan juga Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang berkunjung.

Hasil penelitian Juwita, dkk (2020) terhadap Wisata edukasi museum menyebutkan perlunya menerapkan beberapa konsep dan kebijakan pendidikan yang sesuai. Salah satunya adalah ketersediaan dan kesesuaian sumber daya manusia (*educator guide*). Jika mengacu pada taksonomi Bloom, kompetensi pengelola dalam hal wisata edukasi sebagian besar (84,2%) masih pada tingkat hanya sekedar mengetahui kegiatan wisata edukasi, 10,5% pada tingkat memahami (widyaiswara dan penyuluh kehutanan) dan hanya 5,3% yang sudah mampu mengimplementasikan pengelolaan wisata edukasi karena merupakan widyaiswara bidang KSDA yang sudah berpengalaman dalam mengajar tentang pemanfaatan wisata alam dan pendidikan konservasi. Namun itu pun belum sepenuhnya secara komprehensif sesuai dengan teori-teori mengenai kompetensi dalam pengelolaan wisata edukasi, seperti yang dikemukakan oleh Prosser (1993) dalam Mason (2003), bahwa pengelola wisata edukasi perlu juga dibekali dengan konsep atau pengetahuan mengenai lingkungan pariwisata (*tourism environment*) yang terdiri dari pasar wisatawan (atribut permintaan); informasi, promosi dan petunjuk; transportasi dan komunikasi; serta lingkungan destinasi. Empat kompetensi, yaitu kompetensi konten wisata edukasi, kompetensi kemasan wisata edukasi, kompetensi promosi dan pemasaran serta kompetensi pelayanan dalam kegiatan wisata edukasi, belum dipahami oleh pengelola, sehingga belum mengimplementasikannya dalam kegiatan wisata edukasi.

Kondisi eksisting pengelolaan wisata edukasi di BPLHK Bogor: (1) Dalam pengelolaan wisata edukasi,

pengelola belum memiliki desain materi yang sesuai dengan karakteristik dari pengunjung yang datang, dimana menurut data, sebagian besar pengunjung (37%) berada pada usia dibawah 17 tahun, serta 25% berada pada rentang usia 17-26 tahun, dengan pendidikan rata-rata SMA dan S1. Pengelola hanya menyampaikan materi edukasi sesuai dengan yang tersedia di Hutan Diklat Rumpin, seperti persemaian, lebah madu, pembuatan pupuk bokashi, dan materi lainnya. Menurut hasil penelitian Juwita, dkk (2020), jika ingin berhasil, program kegiatan wisata edukasi perlu adanya penyusunan tujuan, cara pelaksanaan dan sasaran dari wisata edukasi yang diharapkan, (2) Pengelola belum memiliki kompetensi untuk mengemas seluruh objek yang tersedia dalam bentuk paket-paket wisata edukasi dengan baik. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen program/kegiatan edukasi yang terkemas dengan baik dan sistematis. Dimana dokumen kemasan wisata edukasi itu dapat dibuat brosur-brosur atau dalam media digital yang memudahkan pengunjung untuk memilih kemasan objek-objek edukasi. Selama ini kunjungan terhadap objek, hanya diberikan materi secara parsial pada masing-masing objek, (3) Pengelola belum memiliki kompetensi yang memadai mengenai bagaimana cara mempromosikan dan memasarkan wisata edukasi yang dikelola. Demikian juga promosi belum dilakukan secara baik, dengan menggunakan media promosi yang memadai. Kedua cara ini dapat dilakukan secara paralel, sehingga mampu menarik minat pengunjung. Menurut Ali Hasan (2013) promosi terkait dengan bauran promosi. Bauran promosi meliputi periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung dan secara online dan (4) Kompetensi pelayanan pengelola, belum dapat diketahui apakah dalam kategori baik atau kurang baik. Hal ini karena BPLHK Bogor belum melakukan evaluasi atau meminta umpan balik dari pada pengunjung terkait pelayanan yang telah

diberikan oleh pengelola. Menurut Gravin dan Gregorius Chandra (2012), kualitas pelayanan adalah tergantung pada bagaimana seseorang menilainya, sehingga jasa yang menurut seseorang tersebut paling memuaskan merupakan jasa yang memiliki kualitas tertinggi. Sinambela (2006) menyampaikan bahwa kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komprehensif yang dikenal dengan konsep pelayanan prima. Kompetensi pelayanan apa saja yang seharusnya dimiliki oleh para pengelola, yaitu tangibilitas, keandalan, ketanggapan, penjaminan dan empati (Tjiptono, F., 2014).

Dari uraian mengenai kondisi eksisting kompetensi pengelola wisata edukasi yang berasal dari lingkup BPLHK Bogor, terlihat bahwa ada banyak kompetensi dalam pengelolaan wisata edukasi yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Ada 2 aspek yang harus dikembangkan yaitu; materi-materi pengelolaan wisata edukasi dan metodologi pengembangan kompetensi. Materi pengelolaan fokus pada 4 kompetensi yang telah teridentifikasi pada uraian kompetensi eksisting dari pengelola, yaitu kompetensi konten wisata edukasi, kompetensi kemasan wisata edukasi, kompetensi promosi dan pemasaran serta kompetensi pelayanan dalam kegiatan wisata edukasi. Keempat kompetensi yang harus dikuasai pengelola, dapat diketahui dan dikembangkan melalui analisis *supply demand* dan model wisata edukasi yang terbangun.

#### **Analisis Kesesuaian Supply Demand**

Hasil analisis kesesuaian antara supply dan demand, dapat disimpulkan bahwa:

(1) Partisipan sebagai pengelola wisata edukasi yang sesuai antara *supply* dan *demand* hanyalah BPLHK Bogor dan masyarakat. Masyarakat sama-sama dianggap diperlukan kontribusinya dalam pengelolaan wisata edukasi. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan dari wisata edukasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi

berdasarkan penilaian sebagian besar masyarakat (99,10%) bersedia berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan dan 95,50% bersedia berpartisipasi dalam kegiatan Hutan Diklat Rumpin, (2) Empat dari 13 objek/atraksi wisata edukasi yang tersedia di Hutan Diklat Rumpin dibutuhkan oleh responden yaitu camping ground, persemaian tanaman, arena olah raga dan tempat penelitian dan budidaya (arboretum/tanaman obat). Arboretum yang tersedia di Hutan Diklat Rumpin, selain sebagai koleksi tumbuhan juga sebagai sarana penelitian dan budidaya tanaman kehutanan yang diharapkan oleh Responden. Demikian juga dengan persemaian dan tanaman obat, juga merupakan objek budidaya. Namun untuk budidaya khusus tanaman buah dan tanaman hias, belum tersedia, meskipun banyak jenis buah-buahan yang tumbuh seperti matoa, rambutan, kecapi, manga, manggis, dll. Keberadaannya di Hutan Diklat tidak menjadi lokasi khusus Taman Buah. Area olah raga terdapat lapangan tenis, sepak bola, bulu tangkis, tenis meja, panahan dan sarana olah raga lainnya, (3) Sepuluh (10) dari 18 fasilitas/sarana pendukung wisata edukasi yang dibutuhkan Responden telah tersedia di Hutan Diklat Rumpin, yaitu tempat kuliner, Gazebo/shelter, toilet, penginapan, tempat ibadah, Wifi, papan penunjuk arah, pemandu wisata, tempat sampah dan tempat parkir. Tempat kuliner makanan dan minuman serta cafe yang menjadi kebutuhan Responden, dapat dipenuhi dengan meningkatkan kualitas kantin yang telah ada di lokasi wisata. Fasilitas penginapan berkapasitas sekitar 300 orang, mencukupi jika pengunjung datang dalam jumlah besar, (4) Aspek aksesibilitas yang telah sesuai yaitu jalan utama yang mudah ditempuh kendaraan roda 2 dan 4, dengan akses jalan yang cukup baik. lokasi BPLHK Bogor berada di di sisi jalan utama Prada Samlawi, yang mudah ditemukan dan melewati jalan aspal yang memudahkan untuk dilalui. Hanya saja untuk transportasi yang dibutuhkan pengunjung dari luar Kecamatan Rumpin menuju Hutan Diklat

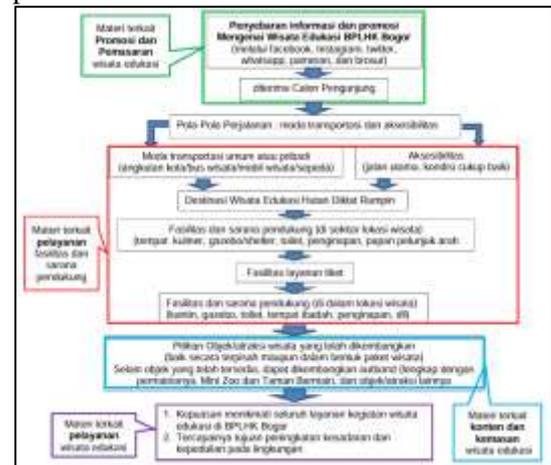
Rumpin belum ada, seperti bus wisata, mobil wisata, sepeda sewa, kereta dan taxi dan (5) Permintaan Responden terhadap informasi yang diperoleh mengenai wisata edukasi di BPLHK Bogor diharapkan melalui berbagai media. Ada 12 media harapan dari Responden, namun hanya ada media Facebook, Instagram dan Twitter. Ketiga media tersebut hingga saat ini masih digunakan oleh BPLHK Bogor dalam penyampaian informasi secara umum, tidak spesifik mengenai wisata edukasi di BPLHK Bogor.

Dalam hal ketidaksesuaian antara *supply* dan *demand*, menurut responden untuk partisipasi sebaiknya menambah keterlibatan sekolah, mahasiswa dan perangkat desa dalam pengelolaan wisata edukasi. Untuk objek/atraksi wisata, pengembangan wisata edukasi dapat diarahkan pada pengembangan area outbond lengkap dengan segala permainannya yang mengandung edukasi, mini zoo yang dimanfaatkan bagi beberapa mata pelajaran di SD, SLTP dan SLTA, sesuai kurikulum sekolah, serta taman bermain yang memadukan antara permainan dan pendidikan. Dalam hal fasilitas dan sarana pendukung yang diharapkan pengunjung adalah layanan tiket, kuliner wisata dan tempat belanja/souvenir. Pengembangan fasilitas layanan tiket belum dapat dilakukan karena belum adanya payung hukum terkait penarikan PNPB dari pengelolaan Hutan Diklat, khususnya penarikan tiket masuk bagi pengunjung yang akan berwisata di Hutan Diklat Rumpin. Media informasi dan promosi yang diharapkan pengunjung yaitu whatsapp, pameran, brosur, blog, tiktok, youtube, media elektronik dan koran. Sebagai media promosi kepada masyarakat luas, pameran dan brosur dapat dikembangkan selain peningkatan kualitas media sosial. Pameran-pameran di tingkat Kabupaten, Kotamadya bahkan provinsi dapat diikuti untuk lebih mengenalkan wisata edukasi Hutan Diklat Rumpin. Sebenarnya wisata edukasi Hutan Diklat Rumpin berdekatan dengan objek wisata edukasi yang

terkenal yaitu persemaian permanen, yang telah dikunjungi dan diresmikan oleh Presiden. Berbagai media telah menyiarkan kegiatan tersebut sehingga cukup dikenal masyarakat luas. Hanya saja tetap diperlukan upaya memelihara informasi dan promosi tersebut dengan teratur agar tidak tertinggal dengan destinasi wisata edukasi lainnya yang sangat marak setelah masa pandemi berakhir.

### Model Wisata Edukasi di BPLHK Bogor

Model wisata edukasi yang dibangun memadukan antara eksisting penawaran dan permintaan dari Responden. Model ini sekaligus dapat menjadi dasar pengembangan kompetensi yang dilakukan pada pengelola wisata edukasi, yang meliputi kompetensi konten wisata edukasi, kompetensi kemasana wisata edukasi, kompetensi promosi dan pemasaran serta kompetensi pelayanan, seperti disajikan pada Gambar 3 berikut:



Sumber: Data primer diolah (2024)

Gambar 3.

### Model wisata edukasi di Hutan Diklat BPLHK Bogor

Dari model wisata edukasi yang telah terbangun dan pengembangan kompetensi yang dapat dipetakan, maka dapat disusun materi pengembangan kompetensi bagi pengelola wisata edukasi. Kompetensi dapat memperlihatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dapat menghasilkan kinerja. Kompetensi terdiri dari tiga indikator yang terdiri atas

pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Desler, 2009 dalam Purnomo, 2016). Pengembangan materi ini harus memperhatikan 7 aspek kebutuhan responden yaitu; kurikulum sekolah, persyaratan untuk memperoleh gelar Sekolah Adiwiyata, lokasi acara penerimaan tamu, kegiatan outdoor sekolah/instansi, kegiatan kepramukaan, areal praktik lapangan mahasiswa, serta areal wisata dan olah raga (data primer diolah, 2024). Berdasarkan model wisata edukasi yang telah terbangun maka pengembangan kompetensi tersebut meliputi;

(1) Kompetensi Mengenai Konten dan Kemasan Wisata Edukasi. Konten wisata edukasi merupakan tema/isi dari wisata yang meliputi keunikan, daya tarik dan keanekaragaman produk wisata edukasi yang dapat dikembangkan di BPLHK Bogor. Sesuai hasil *supply demand*, konten wisata edukasi yang didesain selain yang eksisting terdapat di Hutan Diklat Rumpin, juga terkait dengan konten atraksi outbond, minizoo dan taman bermain. Materi yang disusun meliputi; a) Bagaimana mendesain objek/atraksi wisata edukasi yang telah ada di Hutan Diklat Rumpin menjadi kemasan yang dapat memenuhi kebutuhan kurikulum sekolah, persyaratan untuk memperoleh gelar Sekolah Adiwiyata, lokasi acara penerimaan tamu, kegiatan outdoor sekolah/instansi serta kegiatan kepramukaan. Sesuai hasil analisis, materi/konten wisata eksisting yang harus didesain lebih baik adalah camping ground, arboretum koleksi tumbuhan dan sarana penelitian dan budidaya tanaman, persemaian dan tanaman obat serta budidaya khusus tanaman buah dan tanaman hias, b) Bagaimana mendesain outbond dengan segala atraksi dan kemasannya, untuk memenuhi kebutuhan pemenuhan kurikulum sekolah dan kegiatan outdoor sekolah/instansi dan kepramukaan, c) Bagaimana mendesain minizoo dengan semua aktifitasnya, untuk memenuhi kebutuhan implementasi kurikulum sekolah, d) Bagaimana mendesain taman bermain yang mampu

memenuhi kebutuhan para pelajar yang kesulitan mendapatkan lokasi bermain yang berbentuk taman, yang bersifat mendidik dan mudah dijangkau di Kecamatan Rumpin.

(2) Kompetensi Mengenai Promosi dan Pemasaran Wisata Edukasi. Materi terkait promosi dan pemasaran wisata edukasi yang dapat dikembangkan sesuai hasil *supply demand* yaitu; a) Meningkatkan kompetensi untuk pengelolaan medsos yang sudah dimiliki yaitu facebook, Instagram, twitter, dengan memperhatikan aspek rutin membuat/memperkaya konten pada sosial media, menggunakan influencer, sering melakukan interaksi dengan pengikut, mengumpulkan testimoni pelanggan dan memanfaatkan fitur iklan di sosial media, b) Peningkatan kompetensi mengenai bagaimana meningkatkan fungsi whatsapp, pameran, dan brosur sebagai media dalam mempromosikan wisata edukasi yang ada di Hutan Diklat Rumpin. Materi yang dapat dikembangkan yaitu terkait pengetahuan dan keterampilan membuat dan menggunakan whatsapp dan brosur, termasuk pamflet dan buku informasi agar informasi/berita yang disajikan dapat lebih menarik pengunjung, dan c) Peningkatan kompetensi dalam mendesain pameran yang bertujuan mempromosikan wisata edukasi agar dapat lebih menarik pengunjung.

(3) Kompetensi Mengenai Pelayanan Wisata Edukasi. Materi terkait pelayanan wisata edukasi yang dapat dikembangkan sesuai hasil *supply demand* yaitu mengenai; a) Pelayanan yang berwujud (fisik): kemampuan memahami dan menggunakan sarana prasarana dan peralatan yang digunakan dan penampilan pengelola b) Pelayanan keandalan: kemampuan melayani pengunjung wisata edukasi terkait manajemen waktu, sikap perilaku, keramah-tamahan, sopan santun dan etika lainnya serta kemampuan penanganan masalah pengunjung dengan baik dan benar, c) Pelayanan ketanggapan dan empati: kesediaan dan kesiapan karyawan dalam memberikan layanan

dengan cepat dan tepat, memahami kebutuhan pengunjung secara individual dan kemampuan membuat pengunjung merasa nyaman, d) Pelayanan jaminan dan kepastian: kemampuan cara berkomunikasi, kemampuan cara mengelola keamanan pengunjung dan kemampuan memelihara kredibilitas BPLHK Bogor dalam pengelolaan wisata edukasi e) Pelayanan kerjasama pengelolaan: pengelola dituntut memiliki kemampuan untuk mengembangkan kompetensinya dalam hal bentuk dan aturan kerjasama.

Keseluruhan tahapan pada model wisata edukasi merupakan kompetensi pelayanan yang harus dikembangkan bagi pengelola, sejak tahap promosi dilakukan hingga pengunjung menikmati objek/atraksi wisata yang tersedia, dan kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Setelah kemampuan dan materi pengelolaan wisata edukasi teridentifikasi, selanjutnya adalah bagaimana metode pengembangan kompetensi wisata edukasi tersebut akan dilakukan. Karena sebaik apapun materi yang hendak dicapai, efektifitasnya tergantung pada jenis metode pencapaiannya. Selain sesuai dengan aturan mengenai pengembangan kompetensi, juga sesuai dengan kebutuhan spesifik para pengelola wisata edukasi BPLHK Bogor.

#### **Metode Pengembangan Kompetensi**

Metode pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh pengelola mengacu kepada Peraturan Lembaga Administrasi Negara no 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. Sebagian besar responden (56,7%), kompetensi mengenai konten sebaiknya diperoleh melalui metode klasikal dengan cara pelatihan yang didesain untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam menyusun desain/konten wisata edukasi. Untuk metode non klasikal, responden sebagian besar (70%) memilih melalui studi banding, agar pembuatan konten diperoleh melalui pengalaman nyata di tempat yang telah berhasil dalam

menyusun konten wisata edukasi yang menarik.

Peningkatan kompetensi mengenai kemasan, sebagian besar responden (43,33%) memilih melalui pelatihan klasikal, agar peserta memperoleh pengetahuan mengenai kemasan wisata edukasi dan mampu menyusun paket-paket wisata edukasi tersebut agar memenuhi selera konsumen. Konsep produk/kemasan tidak terbatas pada benda-benda fisik saja, menurut Philip Kotler (2002), disamping barang dan jasa, termasuk juga manusia, tempat, organisasi, kegiatan dan gagasan. Kemasan ini akan disesuaikan dengan model wisata edukasi yang telah dibangun dan sesuai dengan lokasi dan karakteristik wilayah sekitar BPLHK Bogor. Untuk metode non klasikal, sebagian besar responden (60%) tetap memilih studi banding, dengan alasan bahwa pengalaman melihat secara langsung penyusunan kemasan wisata edukasi akan lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi. sebagian besar responden (43,33%), peningkatan kompetensi mengenai promosi dan pemasaran ini cukup dilakukan melalui sosialisasi oleh narasumber yang berpengalaman. Disamping itu, sebagian besar reponden (46,67%) juga memilih studi banding untuk memperdalam kompetensi tentang promosi dan pemasaran tersebut. Melalui studi banding ke lokasi wisata alam yang telah berhasil dalam membangun promosi dan pemasaran (dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang selalu banyak dan meningkat), diharapkan pengelola mampu memperoleh pengalaman nyata mengenai cara mempromosikan dan memasarkan kegiatan wisata edukasi.

Kompetensi mengenai pelayanan pada wisata edukasi selain dapat diperoleh melalui berbagai media informasi, namun juga harus diperoleh secara mendalam. Sebagian besar reponden (56,67%) memilih pelatihan klasikal dan 30 % memilih bimbingan teknis untuk memperdalam kompetensi tentang pelayanan wisata edukasi. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis

pengelola berharap mampu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai cara memberikan pelayanan kepada pengunjung wisata edukasi dengan lebih sistematis baik teori maupun praktik. Bentuk pelayanan yang harus dipelajari diantaranya adalah layanan tiket (*ticketing*) dan cara memandu pengunjung. Dalam hal metode non klasikal, responden menyatakan bahwa melalui pengalaman langsung terjun ke lokasi wisata edukasi akan dapat meningkatkan kompetensi, karena banyak unsur pelayanan yang dapat dipraktikkan. Kegiatannya meliputi penyambutan pengunjung, keramahan, cara berpakaian,dll. Oleh karena itu sebagian besar responden (63,33%) menyatakan bahwa kompetensi mengenai pelayanan harus diperoleh melalui magang ke lokasi wisata yang sudah sangat baik dalam pelayanannya. Melalui magang maka akan diperoleh pengalaman nyata mengenai pentingnya pelayanan dalam sebuah kegiatan wisata edukasi. Secara ringkas metode pengembangan kompetensi bagi pengelola wisata edukasi di Hutan Diklat BPLHK Bogor disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2.  
Metode pengembangan kompetensi  
pengelola wisata edukasi

NO	MATERI	KLASIKAL					NON KLASIKAL					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Konten wisata edukasi (keunikan, daya tarik dan kemenarikan produk wisata edukasi )	V								V		
2	Kemasan wisata edukasi (pengemasan produk wisata edukasi )	V								V		
3	Promosi dan Pemasaran wisata edukasi					V		V				
4	Pelayanan wisata edukasi (kualitas pelayanan, karakteristik pelayanan yang memberikan kepuasan pada pengunjung)	V						V				

Sumber : Data primer diolah (2024)

**Keterangan :**

- A. Pelatihan
- B. Workshop/Lokakarya
- C. Kursus
- D. Bimbingan Teknis
- E. Sosialisasi
- F. Magang
- G. Studi banding
- H. Belajar Mandiri
- I. Pelatihan Jarak Jauh/E-Learning
- J. Coaching/mentoring
- K. Detasemen

Dari Tabel 2 terlihat bahwa pelatihan menjadi metode pengembangan kompetensi klasikal yang paling diminati oleh pengelola. Spencer dan Spencer (dalam Priansa, 2014) menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu cara untuk

memperoleh kompetensi. Hasil penelitian Purnomo, dkk (2016) menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki sumbangan pengaruh sebesar 80,2% terhadap kompetensi. Dengan tersusunnya jenis pengembangan kompetensi mengenai wisata edukasi yang dipilih oleh pengelola, maka selanjutnya dijadikan dasar sebuah perencanaan pengembangan wisata edukasi di BPLHK Bogor secara lengkap.

**KESIMPULAN**

Studi ini menunjukkan bahwa salah satu faktor penting tercapainya keberhasilan pengembangan wisata edukasi adalah kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola wisata edukasi tersebut. Pengelolaan wisata edukasi mengandung banyak kegiatan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang spesifik yang harus dipenuhi, karena terkait dengan aspek pelayanan kepada orang-orang yang akan mengunjungi wisata edukasi tersebut. Dengan terpenuhinya kompetensi tersebut, maka tujuan utama wisata edukasi yaitu meningkatkan kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan akan dapat tercapai. Temuan studi yang dilaksanakan di Hutan Diklat BPLHK Bogor menunjukkan bahwa perencanaan sebuah wisata edukasi harus dimulai dari menjangring kebutuhan pengunjung sebagai konsumen. Kebutuhan dan ketersediaan komponen wisata edukasi di BPLHK Bogor dapat dirumuskan sebagai model wisata edukasi yang sesuai untuk diimplementasikan di BPLHK Bogor. Salah satu komponen penting dalam implementasi tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola wisata edukasi. Berdasarkan hasil temuan, kompetensi mengenai konten, kemasan, informasi/promosi dan pelayanan wisata edukasi tersebut dibutuhkan oleh pengelola dari kegiatan pelatihan, sosialisasi, studi banding dan magang pada lokasi wisata yang telah berhasil.

Sebagai rekomendasi dalam penelitian ini, dalam upaya mempercepat proses implementasi model wisata edukasi di BPLHK Bogor serta pentingnya penguatan di setiap titik wisata di Kecamatan Rumpin, maka diperlukan adanya terobosan-terobosan yang lebih nyata yaitu ditingkatkannya pendekatan secara persuasif dengan komunitas masyarakat, peningkatan mekanisme kerjasama dengan usaha wisata melalui perekrutan berbagai bentuk usaha wisata masyarakat seperti outbond, minizoo, dan bentuk atraksi wisata lainnya. Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi/promosi kepada calon pengunjung melalui berbagai media serta meningkatkan kualitas dari objek-objek wisata edukasi, fasilitas dan sarana pendukung lainnya secara baik dan berkala. Keseluruhan dari implementasi tersebut membutuhkan adanya kompetensi yang memadai dari para pengelola wisata edukasi. Oleh karena itu sangat penting untuk mendesain kurikulum dan pelatihan termasuk materi-materi untuk peningkatan kompetensi pengelola wisata edukasi sesuai temuan hasil penelitian yaitu model wisata edukasi di BPLHK Bogor serta menyusun kembali tim pengelola wisata edukasi yang diperkuat dengan surat keputusan. Selanjutnya mengikutsertakan para pengelola pada pelatihan-pelatihan bidang wisata baik di internal BPLHK Bogor maupun di lembaga pelatihan lainnya serta menugaskan pengelola untuk mengikuti magang dan studi banding ke kawasan wisata edukasi yang telah berhasil.

Dengan meningkatnya kompetensi pengelola diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan partisipasi pengunjung dan masyarakat Rumpin dalam menjaga lingkungannya .

#### REFERENSI

Abdul Karim. (2017). Mengembangkan Kesadaran Melestarikan lingkungan Hidup berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Jurnal Edukasia*:

*Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* Vol. 12, No. 2, Agustus 2017.

Agustini, Qori dan Marpaung, David. (2023). Problematika Penambangan Pasir Sebagai Wujud Antroposentrisme: Studi Kasus di Wilayah Rumpin Kabupaten Bogor. *International Journal of Demos*, Jurnal Volume 5, Issue 4, Desember 2023 E-ISSN 2721-064

Ali Hasan. (2013). *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. (2014). *Data Kawasan Rawan Longsor, Jawa Barat*. Bogor. Pusat BPBD Indonesia.

Bodger, David. (1998). Leisure, Learning, and Travel, *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 69:4, 2831, DOI: 10.1080/07303084.1998.10605532.

Cadizza Riza dan Chatias Riza Pratama. (2024). Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia. *Unmuha Law Journal* 83 Vol.1 No.2 Tahun 2024 ISSN: 3032 - 1018 DOI

Cangara H. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta (ID). Raja Grafindo Persada.

Cooper, Chris. (1993). *Tourism: Principles & Practise*. England: Longman Group Limited.

Georgia Yfantidou, Dimitrios Goulimaris. (2018). The Exploitation Of Edutourism In Educational Society: A Learning Experience Necessity Through Physical Activity And Recreation. *International Scientific Journal Of Kinesiology*. Department of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Greece.

Gold, SM. 1980. *Recreation and Planning Design*. Mc Graw-Hill Book Company: New York.

Gravin Gregorius Chandra 2012. *Service Quality & Satisfaction*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Gunn, A. Clare. (1998). *Tourism Planning*. New York University Press.

- Juwita, T, dkk.(2020). Pengembangan Model Wisata Edukasi di Museum Pendidikan Nasional. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation* (Vol 1 No 3:8-17)
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.220 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2021 Tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Wisata Alam Rumpin seluas 75,353 Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- Keraf, A. Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Kanisius. Yogyakarta
- Kunartinah. 2010. *Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pembelajaran Organisasi Terhadap Kinerja dengan kompetensi sebagai Mediasi*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, V ol. 17, No. 1 (<http://www.unisbank.ac.id>)
- Maesari, N dkk. (2019). Pengembangan Wisata Edukasi Berkelanjutan di Museum Geologi Bandung. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan* (Vol. 3 No.1 : 8-17 Tahun 2019)
- Mason, Peter. 2003. *Tourism Impacts, Planning and Management*. Butterworth-Heinemann.
- Mill Robert Christie and Morrison. 1985. *The Tourism System*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara no 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-lan-no-10-tahun-2018>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 - 2025.
- Philip Kotler. 2002. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Prenhallindo.
- Priyandari. 2011. Jenis-jenis Model. [https://priyandari.staff.uns.ac.id/2011\\_08/model-jenis-jenis-model](https://priyandari.staff.uns.ac.id/2011_08/model-jenis-jenis-model). Diunduh 12 Desember 2023.
- Priansa, DonniJuni, dan Rismi Somad. 2014. *Manajemen Supervisi & Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Prahalad & Hamel (1990). *The Core Competence Of The Coperation*. *Harvard Business Review* May-June 1990.
- Purnomo, D., dkk. 2016. Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Kompetensi Serta Dampaknya Pada Kinerja Pramuwisata Bali. *Jurnal IPTA* Vol. 4 No. 2, 2016
- Rio Apinio. 2019. Orang-Orang Mati karena Truk Tambang, tapi Pemerintah Lepas Tangan, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak serius menyelesaikan masalah truk tambang di Bogor Barat. *Tirto.id*. diunduh Juli 2023
- Rusdiyanto. 2015. Masalah Lingkungan Hidup Indonesia Menghadapi Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.2 Desember 2015.
- Sinambella, Lijan Poltak. (2006) *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Tjiptono, F. (2014). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Unesco. *Intergovernmental Conference on Environmental Education organised by Unesco in co-operation with UNEP Tbilisi (USSR)*. *Final Report*, 74 - 26 October 1977
- Wood, Megan Epler. 2002. *Ecotourism : Principles, Practices & Policies for Sustainability*. Paris : United Nations Enviroment Programme (UNEP)

## **BIODATA PENULIS**

### **Diah Zuhriana**

Merupakan Pengajar/Widyaiswara Bidang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekowisata di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor.

### **Caca Syahroni**

Merupakan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional, berkedudukan di Lido Bogor

### **Adi Susmianto**

Pakar Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE), Saat ini menjabat sebagai asesor bidang Kehutanan.